

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pembangunan dalam suatu negara pada dasarnya diarahkan untuk meningkatkan kualitas hidup manusia secara berkelanjutan, bukan sekadar memperbesar kapasitas produksi suatu negara atau daerah. Pergeseran paradigma ini terlihat sejak diperkenalkannya konsep *human development* oleh *United Nations Development Programme* (UNDP) pada awal 1990-an yang menempatkan manusia sebagai tujuan utama pembangunan. Pendekatan tersebut menegaskan bahwa pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak secara otomatis meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial apabila tidak disertai distribusi yang merata (Todaro & Smith, 2020). Di Indonesia, Badan Pusat Statistik juga menekankan bahwa pembangunan manusia harus diukur melalui indikator yang mencerminkan dimensi kesehatan, pendidikan, dan standar hidup layak (BPS, 2023). Oleh karena itu, ukuran pembangunan yang bersifat multidimensional menjadi landasan utama dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan publik di tingkat nasional maupun daerah.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator komposit yang mengukur capaian pembangunan manusia melalui tiga dimensi dasar, yaitu umur panjang dan sehat, pengetahuan, serta standar hidup layak. Dimensi kesehatan direpresentasikan oleh umur harapan hidup saat lahir, dimensi pendidikan diukur melalui harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah, sedangkan dimensi standar hidup layak diukur melalui pengeluaran riil per kapita yang disesuaikan (BPS, 2023). IPM digunakan secara nasional maupun daerah sebagai indikator kinerja pembangunan sosial. Nilai IPM yang meningkat menunjukkan adanya

perbaikan akses dan kualitas layanan dasar masyarakat. Variasi IPM antarwilayah di Indonesia masih menunjukkan ketimpangan yang dipengaruhi oleh kondisi ekonomi dan demografi masing-masing daerah (UNDP, 2022).

Badan Pusat Statistik melaporkan bahwa Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia sebesar 72,91 pada tahun 2022 dan meningkat menjadi 73,55 pada tahun 2023 (BPS, 2024). Kenaikan sebesar 0,64 poin tersebut menunjukkan pertumbuhan sebesar 0,88 persen dalam satu tahun. Namun, peningkatan tersebut tidak terjadi secara merata di seluruh wilayah Indonesia. Pada tahun 2023, Provinsi DKI Jakarta mencatat IPM sebesar 81,65, sedangkan Provinsi Papua Pegunungan mencatat IPM sebesar 54,43 (BPS, 2024). Perbedaan capaian tersebut menunjukkan bahwa kondisi ekonomi daerah, kapasitas fiskal pemerintah daerah, dan struktur demografi penduduk memengaruhi kualitas pembangunan manusia, sehingga analisis pada tingkat kabupaten diperlukan untuk menjelaskan variasi tersebut secara lebih spesifik.

Salah satu indikator ekonomi yang relevan dalam menjelaskan variasi Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita harga konstan. (BPS, 2023) mendefinisikan PDRB per kapita harga konstan sebagai nilai tambah barang dan jasa yang dihasilkan suatu daerah dibagi jumlah penduduk dengan menggunakan tahun dasar tertentu untuk menghilangkan pengaruh inflasi. Indikator ini mencerminkan kemampuan riil perekonomian daerah dalam menghasilkan pendapatan. Peningkatan PDRB per kapita secara teoritis memperbesar daya beli masyarakat terhadap layanan pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan dasar lainnya, sehingga berpotensi meningkatkan kualitas sumber daya manusia (Todaro & Smith, 2020). Literatur pembangunan manusia juga menjelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi yang

diikuti distribusi pendapatan yang memadai dapat memperkuat capaian dimensi kesehatan, pendidikan, dan standar hidup layak dalam IPM (UNDP, 2022).

Beberapa penelitian empiris terbaru menunjukkan hasil yang beragam mengenai pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Penelitian panel data pada 10 kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Timur menemukan bahwa variabel PDRB per kapita berpengaruh positif dan signifikan terhadap IPM selama periode 2017–2021, yang ditandai oleh koefisien regresi positif dengan tingkat signifikansi statistik yang kuat, menunjukkan bahwa peningkatan PDRB per kapita berkaitan dengan peningkatan kualitas pembangunan manusia di daerah tersebut (Williyan & Hasmarini, 2024). Sebaliknya, (Andini & Zakiyyah, 2024) menunjukkan bahwa PDRB per kapita tidak selalu berpengaruh signifikan terhadap IPM karena pola konsumsi masyarakat yang beragam dan ketidakmerataan distribusi pendapatan di berbagai provinsi, sehingga peningkatan output ekonomi per orang tidak secara langsung diterjemahkan menjadi peningkatan indikator pembangunan manusia. Selain kapasitas ekonomi, tingkat kemiskinan merupakan variabel yang berkaitan langsung dengan dimensi standar hidup layak dalam IPM.

Menurut (Ray & Bell, 2018), kemiskinan menggambarkan kondisi ketika individu atau rumah tangga tidak memiliki sumber daya yang memadai untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti pangan, sandang, perumahan, pendidikan, dan kesehatan. Kondisi tersebut menyebabkan keterbatasan dalam meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya, (Perkins & Radelet, 2018) menjelaskan bahwa kemiskinan merupakan salah satu hambatan utama dalam proses pembangunan karena keterbatasan pendapatan akan membatasi akses masyarakat terhadap layanan pendidikan, kesehatan, serta peluang

ekonomi. Oleh karena itu, tingginya tingkat kemiskinan dapat menghambat peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pada akhirnya memengaruhi capaian pembangunan manusia yang tercermin dalam nilai IPM.

Beberapa penelitian empiris menunjukkan bahwa hubungan antara tingkat kemiskinan dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tidak selalu konsisten di berbagai konteks wilayah. Penelitian di Provinsi Sumatera Selatan menemukan bahwa kemiskinan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap IPM, dimana peningkatan persentase kemiskinan berdampak pada penurunan capaian pembangunan manusia dalam model regresi panel data (Trisno & Oktarina, 2021). Di Provinsi Nusa Tenggara Barat, studi lain juga menunjukkan bahwa kemiskinan memiliki efek negatif signifikan terhadap IPM, mengindikasikan bahwa tingginya tingkat kemiskinan berkaitan dengan rendahnya kualitas hidup masyarakat (Maulana & Huda, 2024). Di sisi lain, penelitian di (Engelica & Chasanah, 2025), Kabupaten Sragen tahun 2015-2024 menemukan bahwa kemiskinan memiliki arah hubungan negatif terhadap IPM tetapi tidak berpengaruh signifikan setelah memasukkan variabel lain seperti pendidikan dan pengangguran dalam model analisis.

Di samping faktor ekonomi, struktur demografis turut memengaruhi capaian pembangunan manusia. Badan Pusat Statistik menjelaskan bahwa rasio ketergantungan (*dependency ratio*) merupakan perbandingan antara jumlah penduduk usia tidak produktif (0–14 tahun dan ≥ 65 tahun) dengan jumlah penduduk usia produktif (15–64 tahun) dalam suatu wilayah (BPS, 2023). Rasio tersebut menggambarkan besarnya beban ekonomi yang harus ditanggung oleh penduduk usia produktif dalam memenuhi kebutuhan kelompok usia muda dan lanjut usia. (Tirtana et al., 2024) menyatakan bahwa rasio ketergantungan yang

tinggi dapat meningkatkan tekanan terhadap pendapatan rumah tangga dan kapasitas fiskal pemerintah daerah, sehingga memengaruhi kemampuan pembiayaan layanan pendidikan dan kesehatan.

Kondisi ini terjadi karena semakin besar proporsi penduduk yang tidak produktif dibandingkan dengan penduduk usia kerja akan meningkatkan beban ekonomi yang harus ditanggung oleh kelompok usia produktif. Dengan demikian, struktur umur penduduk memiliki implikasi langsung terhadap pembentukan kualitas sumber daya manusia. Hal tersebut didukung oleh penelitian yang dilakukan di Provinsi Kalimantan Timur yang menemukan bahwa rasio ketergantungan berpengaruh terhadap HDI, dimana *dependency ratio* secara negatif dan signifikan mempengaruhi HDI. Artinya semakin tinggi rasio ketergantungan maka capaian pembangunan manusia cenderung menurun di wilayah tersebut (D. L. Sari & Arisetyawan, 2025). Sebaliknya, penelitian yang menguji pengaruh variabel demografis termasuk *dependency ratio* terhadap HDI di Provinsi Aceh menunjukkan bahwa rasio ketergantungan tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap HDI dalam model analisisnya (Shalihah et al., 2021).

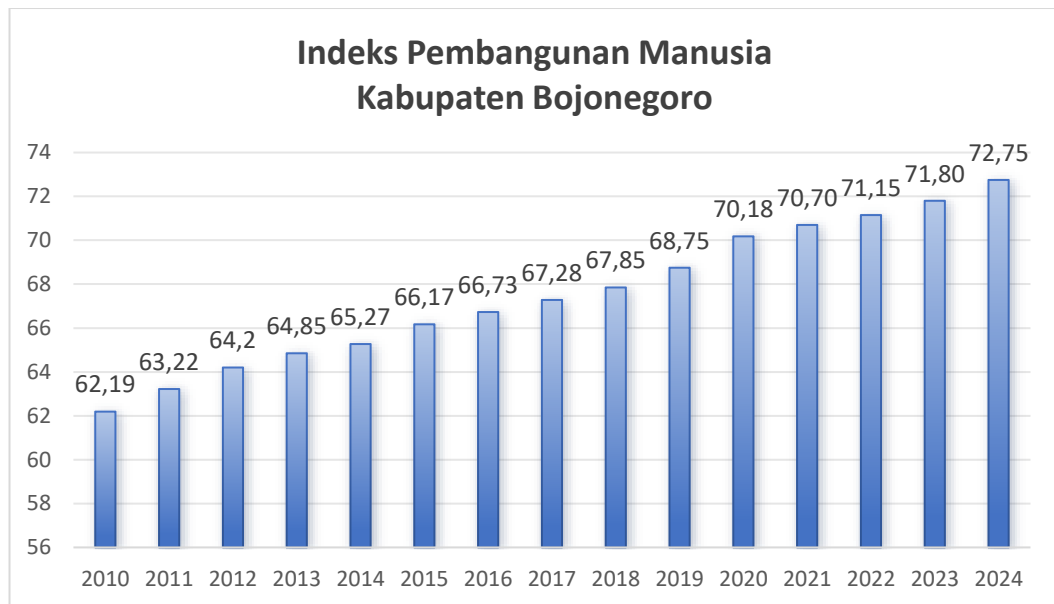
Variabel demografi lainnya yang relevan dalam analisis pembangunan manusia adalah jumlah penduduk. Dalam perspektif ekonomi pembangunan, (Todaro & Smith, 2020) menjelaskan bahwa jumlah penduduk dapat menjadi modal pembangunan (*demographic dividend*) apabila didukung oleh kualitas pendidikan, kesehatan, dan produktivitas tenaga kerja yang memadai. (Bloom et al., 2024) menyatakan bahwa populasi yang besar berpotensi meningkatkan kapasitas produksi dan pasar domestik, sehingga dapat mendorong peningkatan kesejahteraan. Namun demikian, (Mankiw, 2021) menegaskan bahwa pertumbuhan penduduk yang tidak diimbangi dengan akumulasi modal dan

peningkatan kualitas sumber daya manusia dapat menekan penyediaan layanan publik, termasuk pendidikan dan kesehatan.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Khairunnisa et al., (2023) yang dilakukan pada kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan menemukan bahwa jumlah penduduk berpengaruh positif dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia, karena peningkatan populasi di wilayah perkotaan berkorelasi dengan peningkatan aktivitas ekonomi dan akses layanan pendidikan. Sebaliknya, penelitian oleh Azizah & Asiyah, (2022) di Provinsi Jawa Timur menunjukkan bahwa jumlah penduduk tidak berpengaruh signifikan terhadap IPM.

Kabupaten Bojonegoro merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Timur yang struktur perekonomiannya sangat dipengaruhi oleh sektor pertambangan dan energi. Ketergantungan terhadap sektor ekstraktif menyebabkan fluktuasi kinerja ekonomi daerah relatif tinggi mengikuti dinamika harga komoditas dan produksi migas. Badan Pusat Statistik Kabupaten Bojonegoro mencatat bahwa Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Bojonegoro pada tahun 2024 mencapai 72,75 dan termasuk kategori tinggi. Meskipun demikian, capaian tersebut belum menempatkan Bojonegoro pada kelompok kabupaten dengan IPM tertinggi di Jawa Timur. Kondisi ini menunjukkan bahwa tingginya kapasitas ekonomi daerah belum sepenuhnya diikuti oleh percepatan peningkatan kualitas pembangunan manusia.

Gambar 1 1 IPM Kabupaten Bojonegoro Tahun 2010 - 2024

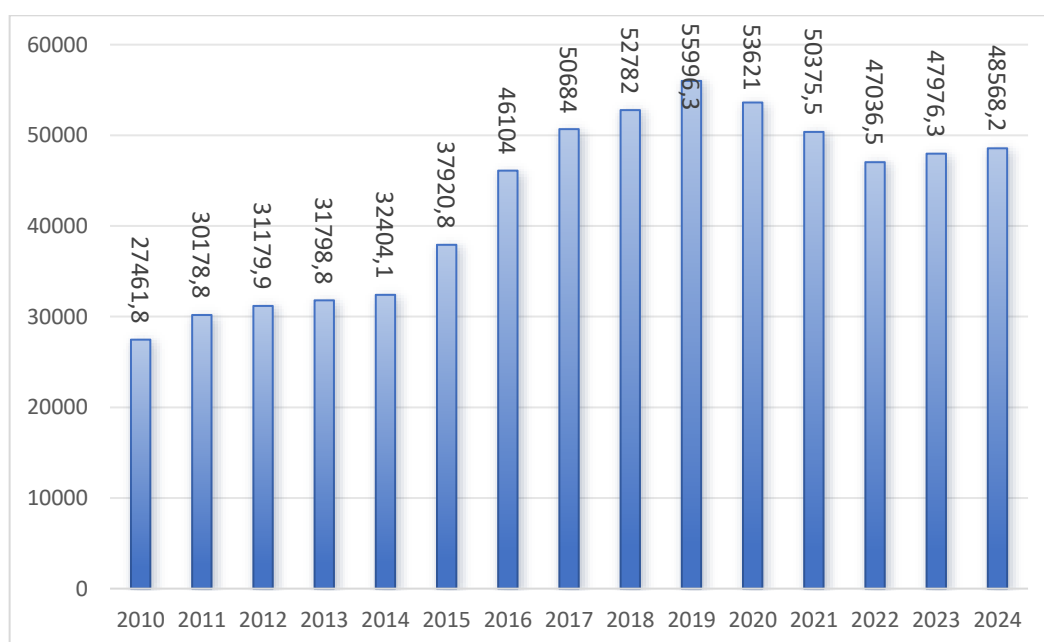


Sumber: BPS Jawa Timur (2025).

Berdasarkan data Kabupaten Bojonegoro selama periode 2010–2024, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menunjukkan tren peningkatan yang relatif konsisten. Pada tahun 2010 nilai IPM tercatat sebesar 62,19 dan terus meningkat hingga mencapai 72,75 pada tahun 2024. Peningkatan ini menunjukkan adanya perbaikan pada dimensi utama pembangunan manusia, yaitu kesehatan, pendidikan, dan standar hidup layak. Secara umum kenaikan IPM terjadi secara bertahap setiap tahun, meskipun laju peningkatannya tidak selalu sama. Pada beberapa periode seperti tahun 2019–2021 peningkatan IPM terlihat lebih moderat dibandingkan periode sebelumnya. Namun secara keseluruhan, tren tersebut menunjukkan bahwa kualitas pembangunan manusia di Kabupaten Bojonegoro mengalami peningkatan yang cukup baik dalam jangka panjang. Meskipun demikian, peningkatan tersebut masih dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor ekonomi dan sosial yang terjadi di daerah.

Gambar 1 2 PDRB Per Kapita Atas Dasar Harga Konstan Kabupaten

Bojonegoro Tahun 2010 - 2024

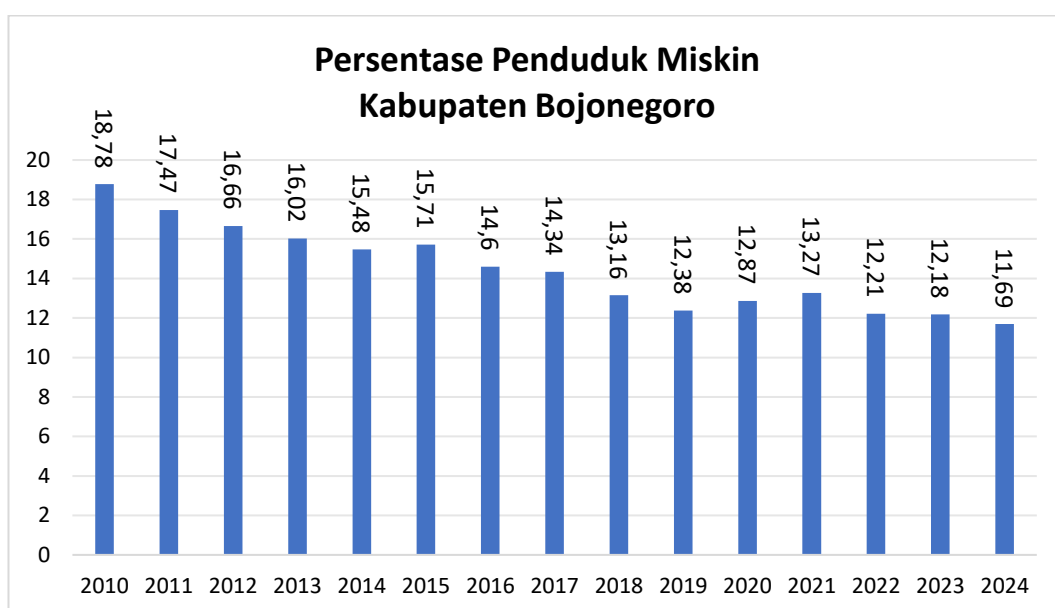


Sumber: BPS Jawa Timur (2025).

Berdasarkan data PDRB per kapita atas dasar harga konstan (tahun dasar 2010) Kabupaten Bojonegoro periode 2010–2024, terlihat bahwa perekonomian daerah mengalami peningkatan yang cukup signifikan pada periode awal. Nilai PDRB per kapita meningkat dari 27.461,8 pada tahun 2010 menjadi 55.996,3 pada tahun 2019. Namun, setelah tahun 2019 terjadi penurunan pada beberapa tahun berikutnya, yaitu menjadi 53.621 pada tahun 2020 dan terus menurun hingga mencapai 47.036,5 pada tahun 2022. Penurunan ini menunjukkan adanya kontraksi ekonomi pada periode tersebut. Selanjutnya, pada tahun 2023 dan 2024 mulai terlihat adanya pemulihan dengan meningkatnya PDRB per kapita menjadi 47.976,3 dan 48.568,2. Pola ini menunjukkan bahwa meskipun dalam jangka panjang PDRB per kapita mengalami peningkatan, terdapat fluktuasi yang cukup

signifikan pada periode tertentu. Kondisi ini mencerminkan adanya dinamika dalam perekonomian daerah yang berpotensi memengaruhi tingkat kesejahteraan masyarakat.

Gambar 1 3 Kemiskinan Kabupaten Bojonegoro Tahun 2010 – 2024

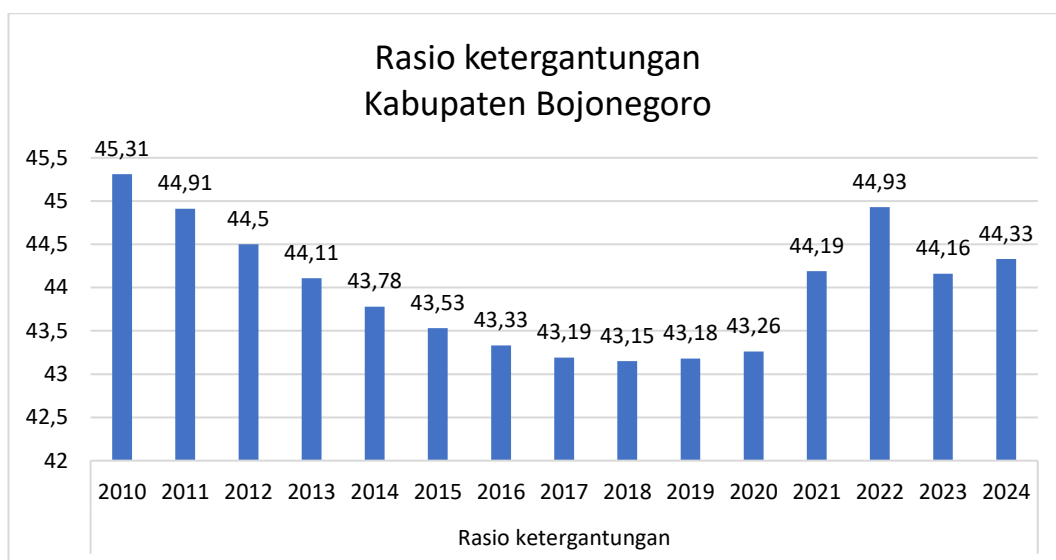


Sumber: BPS Jawa Timur (2025).

Berdasarkan data persentase penduduk miskin Kabupaten Bojonegoro selama periode 2010–2024, tingkat kemiskinan secara umum menunjukkan tren penurunan. Pada tahun 2010 persentase penduduk miskin tercatat sebesar 18,78% dan terus menurun secara bertahap hingga mencapai 15,48% pada tahun 2014, meskipun sempat mengalami sedikit kenaikan pada tahun 2015 menjadi 15,71%. Selanjutnya, tingkat kemiskinan kembali menurun hingga mencapai 12,38% pada tahun 2019. Pada tahun 2020 dan 2021 terjadi peningkatan kembali masing-masing menjadi 12,87% dan 13,27%, yang menunjukkan adanya tekanan kondisi ekonomi yang memengaruhi kesejahteraan masyarakat. Namun setelah itu, persentase penduduk miskin kembali mengalami penurunan menjadi 12,21%

pada tahun 2022, relatif stabil pada tahun 2023 sebesar 12,18%, dan kembali menurun pada tahun 2024 menjadi 11,69%. Meskipun sempat mengalami fluktuasi pada beberapa tahun tertentu, tren jangka panjang menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan di Kabupaten Bojonegoro cenderung menurun, yang mengindikasikan adanya perbaikan kondisi sosial ekonomi masyarakat.

Gambar 1 4 Rasio Ketergantungan Kabupaten Bojonegoro Tahun 2010 - 2024



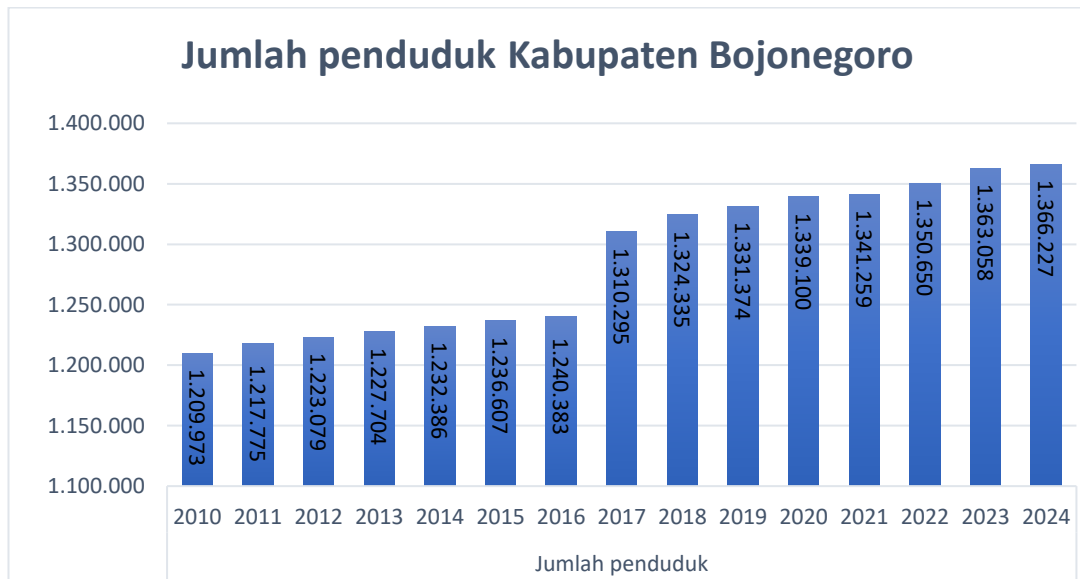
Sumber: BPS Jawa Timur (2025).

Berdasarkan data rasio ketergantungan Kabupaten Bojonegoro selama periode 2010–2024, terlihat bahwa rasio ketergantungan pada awal periode cenderung mengalami penurunan. Pada tahun 2010 rasio ketergantungan tercatat sebesar 45,31 dan secara bertahap menurun hingga mencapai 43,15 pada tahun 2018. Penurunan ini menunjukkan bahwa proporsi penduduk usia produktif relatif lebih besar dibandingkan penduduk usia nonproduktif, sehingga beban tanggungan ekonomi terhadap kelompok usia produktif menjadi lebih rendah. Namun setelah periode tersebut, rasio ketergantungan kembali mengalami

peningkatan. Nilainya meningkat menjadi 44,19 pada tahun 2021 dan mencapai 44,93 pada tahun 2022 sebelum kembali sedikit menurun menjadi 44,16 pada tahun 2023 dan 44,33 pada tahun 2024. Perubahan pola tersebut menunjukkan bahwa setelah mengalami penurunan pada periode awal, rasio ketergantungan di Kabupaten Bojonegoro mulai mengalami peningkatan kembali pada beberapa tahun terakhir.

Kondisi ini mengindikasikan adanya peningkatan jumlah penduduk usia nonproduktif yang harus ditanggung oleh penduduk usia produktif. Apabila rasio ketergantungan meningkat, maka beban ekonomi yang harus ditanggung oleh kelompok usia produktif juga cenderung meningkat. Hal ini dapat berdampak pada kemampuan rumah tangga dalam memenuhi kebutuhan dasar seperti pendidikan dan kesehatan. Oleh karena itu, dinamika rasio ketergantungan di Kabupaten Bojonegoro menjadi salah satu faktor demografis yang dapat memengaruhi kondisi kesejahteraan masyarakat dan perkembangan pembangunan manusia di daerah tersebut.

Gambar 1 5 Jumlah Penduduk Kabupaten Bojonegoro Tahun 2010 - 2024



Sumber: BPS Jawa Timur (2025).

Berdasarkan data jumlah penduduk di Kabupaten Bojonegoro tahun 2010–2024, terlihat adanya tren peningkatan jumlah penduduk dari 1.209.973 jiwa pada tahun 2010 menjadi 1.366.227 jiwa pada tahun 2024. Peningkatan jumlah penduduk ini terjadi secara bertahap hampir setiap tahun. Pada periode 2010–2016 pertumbuhan penduduk cenderung meningkat secara perlahan dari 1.209.973 jiwa menjadi 1.240.383 jiwa. Selanjutnya, peningkatan yang cukup signifikan terlihat pada periode 2016–2017, di mana jumlah penduduk naik menjadi 1.310.295 jiwa. Setelah itu, jumlah penduduk terus mengalami kenaikan secara relatif stabil hingga mencapai 1.366.227 jiwa pada tahun 2024.

Pertumbuhan jumlah penduduk yang terus meningkat tersebut tentu membawa implikasi terhadap kebutuhan pembangunan daerah, seperti penyediaan lapangan kerja, peningkatan layanan pendidikan, fasilitas kesehatan, serta pembangunan infrastruktur dasar. Apabila pertumbuhan penduduk tidak diimbangi dengan peningkatan kapasitas ekonomi daerah dan kualitas sumber

daya manusia, maka hal tersebut berpotensi menimbulkan tekanan terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat serta daya dukung pembangunan di daerah.

Berdasarkan keseluruhan data periode 2010–2024, kondisi pembangunan di Kabupaten Bojonegoro menunjukkan adanya dinamika yang belum sepenuhnya stabil. Peningkatan IPM yang terjadi setiap tahun tidak selalu diikuti oleh pertumbuhan ekonomi yang konsisten, sebagaimana tercermin dari fluktuasi PDRB harga konstan pada periode tertentu. Selain itu, tingkat kemiskinan yang sempat mengalami kenaikan kembali serta rasio ketergantungan yang menunjukkan tren meningkat dalam beberapa tahun terakhir mengindikasikan adanya tekanan demografis terhadap penduduk usia produktif. Pertumbuhan jumlah penduduk yang terus berlangsung juga berpotensi memperbesar kebutuhan terhadap penyediaan lapangan kerja dan layanan dasar. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa capaian pembangunan manusia masih menghadapi tantangan struktural dari sisi ekonomi dan demografi.

Berdasarkan uraian tersebut, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Faktor Ekonomi Dan Demografi Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Bojonegoro”**.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka, dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Apakah PDRB per kapita berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Bojonegoro?
2. Apakah tingkat kemiskinan berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Bojonegoro?

3. Apakah rasio ketergantungan berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Bojonegoro?
4. Apakah jumlah penduduk berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Bojonegoro?
5. Apakah PDRB per kapita, tingkat Kemiskinan, angka beban ketergantungan dan jumlah penduduk berpengaruh secara simultan terhadap indeks pembangunan manusia di Kabupaten Bojonegoro?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh PDRB per kapita secara parsial terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Bojonegoro.
2. Untuk mengetahui pengaruh kemiskinan secara parsial terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Bojonegoro.
3. Untuk mengetahui pengaruh rasio ketergantungan secara parsial terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Bojonegoro.
4. Untuk mengetahui pengaruh jumlah penduduk secara parsial terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Bojonegoro.
5. Untuk mengetahui PDRB per kapita, tingkat Kemiskinan, angka beban ketergantungan dan jumlah penduduk berpengaruh secara simultan terhadap indeks pembangunan manusia di Kabupaten Bojonegoro?

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat dalam pengembangan teori dan ilmu pengetahuan secara teoritis yang

berhubungan dengan judul ini yaitu pengaruh faktor ekonomi dan faktor demografi terhadap indeks pembangunan manusia di Kabupaten Bojonegoro.

2. Manfaat Secara Praktis

- a. Bagi peneliti, penelitian ini akan memberikan tambahan pengetahuan dan wawasan mengenai topik penelitian ini dan juga sebagai salah satu syarat tugas akhir untuk memperoleh gelar sarjana (S1) pada Program Studi Ekonomi Pembangunan Universitas Bojonegoro.
- b. Bagi Akademisi dan peneliti selanjutnya, penelitian ini diharapkan mampu memberikan tambahan literatur dan tambahan pengetahuan tentang topik penelitian ini.
- c. Bagi pemerintah, hasil dari penelitian ini diharapkan mampu menyediakan kontribusi atau masukan terhadap pembangunan untuk memutuskan kebijakan-kebijakan yang akan diterapkan untuk mengatasi masalah-masalah yang terjadi, sehingga dapat mencapai tujuan.

1.5 Batasan Penelitian

Agar pembahasan dalam penelitian ini tetap fokus pada tujuan penelitian, maka diperlukan batasan agar tidak terjadi pelebaran pada pokok masalah, penulis menetapkan sebagian batasan masalah penelitian. Penelitian ini membahas tentang pengaruh faktor ekonomi dan faktor demografi terhadap indeks pembangunan manusia di Kabupaten Bojonegoro dengan variabel PDRB per Kapita (X1), tingkat kemiskinan (X2), angka beban ketergantungan (X3), jumlah penduduk (X4), dan Indeks pembangunan manusia (Y) di Kabupaten Bojonegoro periode 2010-2024.